



KPU RI

PROFILE ANGGOTA KPU RI
2022-2027

AUGUST MELLAZ



1. Nama : August Mellaz
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Agustus 1976
3. Alamat tempat tinggal : Jl.Teratai No.16 Kp. Tegal Amba RT 001/ 013
Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit
Jakarta Timur 13440
4. Jenis kelamin : Laki-laki / ~~Perempuan~~*
5. Agama : Kristen Protestan
6. Status Perkawinan : a. ~~belum/sudah/pe~~nah kawin*)
b. nama istri/~~suami~~*) : Dr. iur. Asmin Fransiska,
S.H., LL.M
c. jumlah anak: 1 orang
7. Pekerjaan : Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi
(SPD)
8. Riwayat Pendidikan : a. Sekolah Dasar Negeri Banjarsugihan III
Surabaya. Lulus 1989.
b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 26
Surabaya. Lulus 1992.
c. Sekolah Menengah Atas Sejahtera I
Surabaya. Lulus 1995.
d. Fakultas Ekonomi Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur. Lulus 2001.
e. Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik
Universitas Nasional (UNAS) 2019 –
sekarang.
9. Pengalaman Pekerjaan a. Anggota Tim Kajian “Penataan Sistem Politik
dan Sistem Pemilu Indonesia”. Dewan
Pertimbangan Presiden (Wantimpres), (2021).
b. Anggota Bidang Politik “Desk Koordinasi
Pemilihan Umum 2019”. Kementerian
Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan (Kemenko Polhukam), (2019).

- c. Tim Ahli Pemerintah Pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (2016 – 2017).
- d. Tim Peneliti “Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Partai Politik”, bersama Pipit R. Kartawidjaja dan Erik Kurniawan, Kementerian Dalam Negeri (2017).
- e. Penulis bab “*Personal Vote, Candidate-Centered Politics, dan Pembiayaan Pileg 2014*” dalam Buku Pembiayaan Pemilu di Indonesia, Bawaslu RI (2018).
- f. Penulis bab “*Candidate-Centered Politics Dalam Bingkai Pemilu Serentak*” dalam Buku Perihal Kampanye, Bawaslu RI (2019).
- g. Pendamping Riset dan Editor Buku “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015-2020”, Bawaslu RI (2020).
- h. Tim Peneliti “Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu Serentak 2019”. Bawaslu RI (2019).
- i. Tim Seleksi Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, (2017).
- j. Tim Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, (2012).
- k. Fasilitator Orientasi Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU RI (2018 dan 2019).
- l. Anggota Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) “Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu”. Bawaslu RI (2013).
- m. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) “Penyusunan Peraturan dan Evaluasi Pelaksanaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (2012 - 2017).
- n. Program Manager di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi untuk “*Breaking Barrier Election Project*” (2020 – sekarang).

- o. Tim Peneliti riset “Tipologi dan Skema Pendanaan Negara Terhadap Partai Politik”, bersama Pipit R. Kartawidjaja. Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) - Yayasan Tifa (2018).
- p. Fasilitator Nasional “Kursus Strategis Caleg Perempuan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemilu 2014”. Puskapol Universitas Indonesia - The Asian Foundation, (2014).
- q. Konsultan Pemilu “Modul Cara Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR dan DPRD Pemilu 2014”. IndonesianParliamentary Center (IPC) - IFES Indonesia (2014).
- r. Fasilitator “Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi”, KPU RI - *Australian Electoral Commission* (AEC), (2013).
- s. Peneliti “Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilu di Lima Negara Asia Tenggara (Kamboja, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Timor Leste)”, bersama Prof. Ramlan Surbakti, Kemitraan (2013)
- t. Konsultan “Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU)”. KPU RI - The Asia Foundation (TAF), (2012).
- u. Associate Researcher Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (2012 – 2014).
- v. Konsultan Pemilu “Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD: Ambang Batas Parlemen, Alokasi Kursi Dapil, dan Metode Konversi Suara”, IFES Indonesia (2012).
- w. Konsultan Pemilu “Proses Perhitungan Perolehan Suara-Kursi Partai Politik: Rekomendasi Perubahan dalam Revisi Undang-undang Pemilu Legislatif 2014”, bersama Mauricio Claudio. IFES Indonesia (2012).

- x. Konsultan Pemilu “Meningkatkan Peluang Keterpilihan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif Indonesia”, bersama Mauricio Claudio. IFES Indonesia (2012).
- y. Konsultan Pemilu “Pemilu Indonesia: Mendiskusikan Penguatan Sistem”, bersama Prof. Andrew Reynolds. IFES Indonesia (2011).
- z. Konsultan Pemilu “Penyusunan Naskah Advokasi Perubahan UU Pemilu No. 8 tahun 2012: Alokasi Kursi DPR; Ambang Batas Perwakilan; Alokasi Kursi Dapil; dan Metode Konversi Suara-Kursi Partai Politik”, bersama Prof. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy’ari. Kemitraan (2011 - 2012).
- aa. Konsultan Pemilu “Alokasi Kursi DPR 560 ke Provinsi dan Pembentukan Daerah Pemilihan 3-6, 3-8, dan 3-10: Berdasarkan Prinsip Kesetaraan Suara dan Berbasis Sensus Penduduk 2010”. Perludem - Kemitraan (2011).
- bb. Konsultan untuk program Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu (KMPP) dan Yayasan Tifa (2010).
- cc. Program Asisten “Pengumpulan dan Sistematisasi Masukan Publik dalam rangka Uji Kelayakan dan Kelayakan Calon Anggota KPU Periode 2007-2012”. Partnership for Governance Reform (PGR), (2007).
- dd. Junior Researcher “Parliamentary Support Programme DPD RI (PRIDE)”. UNDP (2006 - 2007).
- ee. Program Officer “Transformasi Konflik Berbasis Komunitas” Search For Common Ground In Indonesia (SFCGI-UNDP), (2004 - 2005).
- ff. *Field Officer* di Jawa Timur “Program Pemilu dan Resolusi Konflik Pemilu 2004”. Search For Common Ground In Indonesia (SFCGI-UNDP), (2003 - 2004).

- gg. Analisis Ekonomi “Anti Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Monopoly Watch (2000 - 2002)
10. Pengalaman Organisasi : a. Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) (2016 – sekarang).
 b. Anggota Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia (2018 – sekarang).
 c. Koordinator Pengawasan dan Advokasi Publik Koalisi Pengawasan untuk Pemerintahan yang Baik dan Bersih (KOMWAS PBB), (2006 – 2010).
 d. Sekretaris Jendral Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur (2003 – 2004).
 e. Sekretaris Eksekutif Indonesian Institut Studi Persatuan Etnis dan Ras di Indonesia (INSPIRASI), (1999 – 2002)
 f. Wakil Sekjen (Presidium Internal) KIPP Jawa Timur (1999).
 g. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Surabaya (1998-2001).
11. Pengalaman yang mendukung tugas kepegawaian **) a. Narasumber “Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (2020).
 b. Narasumber “RDPU Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu”. Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI, (2017).
 c. Ahli yang diajukan oleh pemohon Uji Materi UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara No. 51/PUU-X/2012 perihal pemberlakuan Ambang Batas Perwakilan (Parliamentary Threshold) bagi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (2012).

- d. Ahli yang ditunjuk oleh Presiden pada uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di MK pada Perkara No. 38/PUU-XVI/2018, perihal Penentuan Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota (2018).
- e. Fasilitator Rapat Koordinasi “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020: Dana Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Suara dan Penetapan Hasil, serta Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Hasil”. KPU RI (2021).
- f. Narasumber pada Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) tentang “Penataan Sistem Hukum Terintegratif Bidang Politik Dalam Rangka Mewujudkan Tata Politik Nasional yang Subtansial”. Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), (2020).
- g. Narasumber dalam Seminar Internasional “*The Comparisson on Political System Between Indonesia and Malaysia*”. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), (2018).
- h. Narasumber Electoral Studies Program (ESP) “Penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota”. Bawaslu RI (2019).
- i. Narasumber Electoral Studies Program (ESP) “Peran Masyarakat Sipil dalam Pembentukan Kebijakan Kepemiluan”. Bawaslu RI (2018).
- j. Narasumber “Mengukur Politik Uang sebagai Isu Strategis”. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia (2018).

12. Penghargaan yg pernah diperoleh

- Pribadi**
- a. Piagam Penghargaan “Tim Ahli Pemerintah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu hingga disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Menteri Dalam

Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan (2017).

- b. Program Magang “Penerapan UU Prosedur Administrasi Negara Jerman di Landes Agentuer fuer Stuktur und Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH, periode 25 Agustus s/d 22 September 2008”. Deutsche Gessellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) (2008).

Kelembagaan/Organisasi

- a. Penghargaan “NGO Terbaik Bidang Kepemiluan”. Kementerian Dalam Negeri (2017).
- b. Penghargaan “NGO yang Berkontribusi untuk Pengembangan Demokrasi dan Sistem Pemilu”. Komisi Pemilihan Umum (2018).
- c. Penghargaan “Mitra Pendukung Pemilu Serentak 2019”. Komisi Pemilihan Umum (2019).

13. Publikasi Kepemiluan :

Buku

- a. Penguatan Kelembagaan Partai Politik di Indonesia (2021)
- b. Perihal Penyelenggaraan Kampanye – BAB 2 “Personal Vote dan Candidate-Centered Politics dalam Bingkai Pemilu Serentak” (2019)
- c. Pembiayaan Pemilu di Indonesia – BAB 4 “Personal Vote, Candidate-Centered Politics, dan Pembiayaan Pileg 2014” (2018)
- d. Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik (2018)
- e. The Succes and The Barriers to Women’s Representation in Southeast Asia – “Women’s Representation in the Parliament as Result of Different Electoral Systems: A Comparative Study in Five Southeast Asian Countries” (2014)

- f. Cara Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR dan DPRD Pemilu 2014 (2014)
- g. Transparansi, Partisipasi, dan Demokrasi – “Keserentakan Pemilu: Pelaksanaan Pemilu Menuju Pemilu Nasional” (2013)
- h. Menata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilihan Nasional dan Pemilu Daerah (2013)
- i. Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih (2012)
- j. Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna (2012)
- k. Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi (2011)
- l. Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Treshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu (2011)
- m. Membangun Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat: Menyederhanakan Jumlah Partai Politik (2011)
- n. Alokasi Kursi DPR 560 ke Provinsi dan Pembentukan Daerah Pemilihan 3-6 Kursi, 3-8 Kursi, dan 3-10 Kursi (2011)
- o. Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (2010)

Jurnal/artikel

- a. Proporsionalitas, Derajat Keterwakilan, dan Kejajegan Prinsip: Pembacaan SPD atas Penyusunan Dapil DPRD Kabupaten Kota (2018)
- b. Pendalaman Gagasan Kepemiluan di Indonesia (2017)
- c. Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan: Teori, Prinsip, Praktek Alokasi Kursi, dan Pembentukan Daerah Pemilihan (2016)
- d. Sistem Pemilu dan Perangkat Teknis Pemilu (2016)

- e. Membaca Prospek dan Konfigurasi Politik Pemilu 2014: Perubahan Aspek-Aspek Mekanis Sistem Pemilu (2013)
 - f. Membaca Peluang Keterwakilan Perempuan di DPR Pemilu 2014: Pertimbangan Pilihan-Pilihan Kebijakan (2013)
 - g. Menilai Demokrasi Indonesia Paska Pemilu 2009 (2012)
 - h. Brief Hasil Simulasi: Jumlah Partai dan Sistem Kompetisi Partai Politik (2012)
 - i. Efek Formula Elektoral Pemilu Indonesia: Catatan atas Tiga Kali Pelaksanaan Pemilu Paska Reformasi 1998 (2011)
 - j. Mengukur Hasil Pemilu Legislatif 2009 (2009)
 - k. Keserentakan Pemilu Nasional: Menjawab Efektivitas Pemerintahan Presidensialisme Multipartai (2009)
 - l. Membaca Daniel S. Lev – “Daerah Pemilihan, Proporsionalitas, dan Fragmentasi Sistem Kepartaian” (2008)
14. Publikasi Non-Kepemiluan
- a. Indonesia’s Foreign Policy During Soekarno Era 1945-1965: Orientation Shift from Diplomacy to Confrontation (2020)